

Zulkifli Hasan kaget

pelaksana tugas gubernur polisi aktif

Kamis, 25 Januari 2018 17:52 WIB

Jakarta (ANTARA News) - Ketua MPR, Zulkifli Hasan, kaget atas keputusan Menteri Dalam Negeri, Tjahjoe Kumolo, yang menunjuk perwira tinggi aktif polisi menjadi pelaksana tugas gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara

Hasan, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, menyatakan, Jawa Barat dan Sumatera Utara adalah provinsi strategis dengan jumlah penduduk padat.

Dia bertanya, mengapa tidak menunjuk pejabat eselon satu dari Kementerian Dalam Negeri? Kementerian Dalam Negeri pernah menunjuk pejabat strukturalnya, Sumarsono, menjadi pelaksana tugas gubernur DKI Jakarta.

Hasan yang juga ketua umum DPP Partai Amanat Nasional ini menambahkan, saat ini sudah memasuki tahun politik, sehingga politik nasional menjadi "lebih dinamis".

Sejak reformasi 20 tahun lalu, inilah pertama kali perwira tinggi aktif polisi ditunjuk untuk posisi politik. Sementara TNI telah paripurna dengan reposisinya, menarik diri sepenuhnya dari ranah politik praktis.

Hasan mempertanyakan keputusan Kumolo yang kurang lazim itu. "Kalau nanti kinerjanya kurang baik dan terjadi situasi kurang kondusif, maka presiden yang akan menjadi sasaran protes publik," katanya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Kepolisian Indonesia, Komisariss Besar Polisi Martinus Sitompul, mengatakan, dua perwira tinggi polisi bakal menjadi pelaksana tugas gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara, untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur saat Pilkada serentak 2018.

Menurut Martinus, Wakil Kepala Kepolisian Indonesia, Komisariss Jenderal Polisi Syafruddin, saat memberikan arahan mengatakan hal ini.

Dua jenderal polisi itu adalah Asisten Operasi Kepala Kepolisian Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Mochamad Iriawan (bekas kepala Polda Metro Jaya) menjadi pelaksana tugas gubernur Jawa Barat.

Serta Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Martuani Sormin, menjadi pelaksana tugas gubernur Sumatera Utara.

Kepolisian Indonesia, kata Sitompul, masih menunggu surat resmi dari Kumolo untuk memastikan siapa yang akan menduduki jabatan sementara itu.

Pewartanya: Riza Harahap

Editor: Ade P Marboen

Jokowi Akan Beri Kesempatan TNI/Polri jadi Plt Gubernur

Kamis, 25 January 2018 19:33 WIB

Penulis: Putri Anisa Yuliani

<http://mediaindonesia.com/news/read/142372/kekurangan-eselon-i-kemendagri-minta-perwira-polisi-tni-jadi-plt-gubernur/2018-01-25>



ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

BANYAKNYA gubernur yang akan purnajabatan sebelum Pilkada digelar membuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus memutar otak untuk menyediakan pejabat setara eselon I menjadi pelaksana tugas (Plt). Sebabnya jumlah eselon I Kemendagri juga terbatas.

Mendagri Tjahjo Kumolo pun menyebut tidak bisa menunjuk seluruh pejabat eselon I menjadi Plt gubernur karena ada jabatan eselon I yang masih belum definitif serta tidak boleh semua posisi eselon I Kemendagri mengalami kekosongan.

"Bagi saya sebagai Mendagri, saya kan tidak mungkin melepas 17 provinsi seluruhnya dari pejabat eselon I. Apalagi, pejabat eselon I yang Plt kan tidak bisa, belum definitif. Kalau semua dilepas kosong kan Kemendagri. Maka seperti tahun lalu, saya minta kepolisian dan Menteri Polhukam," kata Tjahjo di Kemendagri, Kamis (25/1).

Politisi PDIP itu pun mengusulkan agar ada perwira Polisi dan TNI yang bisa diusulkan menjadi Plt gubernur. Ada dua daerah yang diusulkan Plt kepala daerahnya berasal dari Polisi dan TNI yakni Sumatra Utara (Sumut) dan Jawa Barat (Jabar).

Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut akan habis pada 15 Februari 2018, sementara jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar akan habis pada 13 Juni 2018. Pemerintah tidak mengenal perpanjangan masa jabatan kepala daerah sementara dan juga melarang kekosongan pada kursi pimpinan di daerah. Untuk itu, Tjahjo menilai penunjukkan Plt menjadi hal yang penting.

Usulan ini pun telah ia ajukan ke presiden dan sedang menunggu persetujuan.

"Keputusan presiden belum keluar. Tahun lalu (Pilkada 2017), saya minta polisi juga dikasih, Pak Carlo Tewa, enggak ada masalah," ungkapnya.

Di sisi lain Tjahjo tidak ingin menunjuk Sekretaris Daerah menjadi Plt karena rawan terjadi mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) baik untuk mendukung petahana maupun sebaliknya.

Ia pun menilai wajar jika masyarakat mempertanyakan kebijakannya. Menurutnya penunjukkan Plt dari perwira Polri dan TNI juga penting dilakukan di daerah dengan indeks kerawanan Pemilu tinggi untuk menjaga stabilitas keamanan.

"Kalau kemarin saya menempatkan Aceh, TNI dan Polri, karena tingkat kerawanan di sana cukup tinggi. Mencermati gelagat perkembangan, maka saya taruh itu. Apapun, tanggungjawab untuk stabilitas tata kelola pemerintahan kan saya sebagai Mendagri. Untuk memetakan kondisi daerah saya berkomunikasi terus dengan Kapolri, Panglima TNI dan Menko Polhukam. Menurut saya tidak ada masalah," tukasnya. (OL-6)